

Percakapan dengan

Kautsar Azhari Noer



**Kautsar Azhari Noer**, Guru Besar Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, STF Driyarkara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak 2007 ia diangkat sebagai Honorary Fellow Ibn Arabi Society yang berpusat di Oxford.

---

Kebebasan beragama bersifat mutlak dan harus mendapat jaminan dari negara. Tanpa kebebasan tidak dimungkinkan iman yang tulus. Dan karena sekularisme tidak mesti memusuhi agama, maka pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan agama harus dilakukan. Sebab di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama (teokrasi), peraturan yang diterapkan pasti yang sealiran dengan agama yang diimani penguasa: kebebasan beragama tercabut. Padahal hak-hak dan kebebasan sipil terjamin pada negara-negara yang menganut sistem liberal. Kaitannya dengan kemajemukan agama, masyarakat harus ditanamkan sikap toleran; paham teologis sama sekali tidak boleh dihakimi manusia, yang berhak menghakimi Tuhan semata. Sehingga pluralisme menjadi niscaya.

*Kita akan memperbincangkan seputar tiga isu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Tentang ketiga isu ini, respon masyarakat terbagi menjadi tiga: ada yang menolak, setuju, dan ada juga yang sementara dalam proses memaknai. Ketiga kelompok masyarakat ini, tentu saja, memiliki argumentasi masing-masing. Bagaimana Anda melihat perbedaan respon tersebut dan bagaimana pula pandangan Anda tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sendiri?*

Penolakan umat Islam dan MUI terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa jadi, karena kesalahpahaman. Kadang-kadang, orang belum mengetahui dan memahami betul apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme, tetapi secara *a priori* sudah menolaknya. Ini yang sering terjadi. Celakanya, semua ini kerap tanpa didasari dengan argumentasi. Mereka, termasuk di dalamnya MUI, dengan serta-merta menentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme, begitu pula terhadap Islam liberal. Padahal, yang sering terjadi, atau memang itu sudah terjadi, adalah apa yang dimaksud dengan ketiga paham itu oleh para pendukungnya dan oleh mereka yang menentangnya sungguh berbeda. Misalnya, sekularisme. Tidak selamanya gagasan ini berarti memusuhi agama. Ada yang mengatakan bahwa pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan agama harus dilakukan. Tetapi pemisahan tersebut tidak mesti berarti memusuhi agama. Sebab, kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasanya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

Negara yang didominasi oleh satu agama atau satu mazhab, yang kita sebut dengan negara teokratis, maka peraturan yang diterapkan di negara itu pasti yang sealiran dengan agama atau mazhab yang didukung oleh penguasa. Di situ, saya kira, tidak ada kebebasan beragama. Atau, paling tidak, kebebasan beragama di situ sangat sempit. Di Arab Saudi misalnya, jangankan gereja berdiri di Riyadh atau Mekah, kalau tidak salah, masjid untuk Syi'ah saja tidak ada. Mungkin ada, tapi tersembunyi.

Sebaliknya, di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilakan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

Kendati demikian, sekularisme juga bermacam-macam. Kita harus terlebih dahulu melihat sekularisme yang seperti apa. Sebab, praktik sekularisme di Uni Soviet, agama malah ditekan dan dimusuhi. Namun, lagi-lagi, karena sekularisme berbeda-beda, maka yang harus diperjuangkan adalah model sekularisme yang tidak memusuhi agama.

Saya pernah mendapat kuliah dari Karl Steenbrink, seorang sarjana Belanda. Dia pernah mengatakan bahwa pengertian sekularisme dan sekularisasi seperti karet. Karet itu elastis: bisa ditarik secara lebih luas dan longgar. Artinya, ini sangat tergantung pada siapa yang akan memberi makna terhadap sekularisme dan sekularisasi itu.

Bagi kelompok garis keras, sekularisme adalah musuh agama. Pokoknya, kalau mereka mendengar kata sekularisme – dan yang di Indonesia lazimnya dipersandingkan kepada tokoh-tokoh semacam Nurcholish Madjid (Paramadina), Ulil Abshar Abdalla (Jaringan Islam Liberal), dan Gus Dur – bayangan mereka adalah bahwa sekularisme berbahaya terhadap Islam. Padahal tidak seperti itu. Apakah orang-orang sekular seperti Cak Nur, Gus Dur, dan Ulil memusuhi

Islam? Jawabannya sudah pasti tidak. Justru sebaliknya, mereka ingin mengangkat Islam atau membebaskan Islam dari kungkungan-kungkungan kemunduran, kejumudan dan kekakuan. Mereka menghendaki supaya Islam lebih fleksibel dan bisa menjawab tantangan masa kini. Karena tantangan-tantangan zaman berubah, maka tafsir atas

---

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru ke-bebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimasukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain, sejauh tidak berbuat anarki. Saya lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

---

agama untuk menjawab tantangan-tantangan itu juga bisa berubah, bahkan harus diubah.

Tafsir terhadap Islam juga bermacam-macam, tidak tunggal. Apakah semua tafsir itu benar dan apakah semua tafsir yang dulu sesuai dengan semua zaman dan sanggup menjawab tantangan masa kini dengan problem lokalitas yang berbeda-beda? Itu belum tentu.

*Di kalangan umat Islam ada kelomok-kelompok tertentu seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya, memiliki imajinasi politik bahwa ada kesatuan antara agama dan kekuasaan (al-dîn wa al-dawlah). Bagaimana Anda memandang hal ini?*

Terkait hubungan antara agama dan negara, Islam tidak memberikan aturan yang jelas mengenai konsep negara. Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara Sahabat mengenai *khilâfah* menunjukkan bahwa al-Quran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan jabatan kepala negara setelah Nabi saw wafat. Al-Quran juga tidak pernah memberi aturan ihwal proses pengangkatan kepala negara, berapa lama masa jabatan kepala negara, dan bagaimana proses suksesinya. Al-Quran juga tidak memberikan aturan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip universal, yang tidak hanya berlaku dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain dan sistem-sistem filsafat. Misalnya, keadilan, kejujuran, dan sistem *al-syûrâ* atau musyawarah – yang masih diperdebatkan apakah sama dengan demokrasi atau tidak.

Jadi, dalam konteks ini Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

*Bagaimana dengan gagasan negara Islam atau Piagam Jakarta yang selalu dirujuk dari konsep Piagam Madinah?*

Jawabannya jelas. Gagasan negara Islam, seperti tadi saya katakan, tidak terdapat aturan yang jelas dalam al-Quran. Al-Quran hanya menganjurkan bagaimana memerintah sejauh dibimbing oleh moral. Tidak ada konsep negara. Islam memberikan bimbingan moral kepada para pemeluknya. Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata “islam” dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata “islam” telah mengalami inflasi. Dulu ketika pertama kali ayat turun, *Iqra’*, tidak disebut kata islam.

Yang jauh lebih banyak dalam al-Quran adalah kata *imân*. Nama-nama disiplin keilmuan dan nama-nama karya dahulu tidak memakai kata ‘islam.’ *Târîkh al-Thabarî*, misalnya, tidak disebut dengan *Târîkh al-Islâm al-*

*Thabarî*. Begitu pula *Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* dan kitab-kitab lain tidak menggunakan kata ‘islam.’ Madrasah terkenal pada masa Abu Hamid al-Ghazali, yaitu *al-Nizhâmiyah*, tidak disebut *al-Madrasah al-Islâmiyah al-Nizhâmiyah*. Sekarang ini kata ‘islam’ banyak dipakai: negara Islam, sains Islam, bank Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Dahulu banyak yang memiliki kualitas Islam, tanpa menyebut kata ‘islam.’ Tetapi sekarang terbalik, mereknya Islam, isinya belum tentu.

---

Kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasa-nya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

---

*Menurut Anda, apa sebenarnya liberalisme dan mengapa banyak orang begitu rupa menentanginya?*

Liberalisme mempunyai banyak arti. Ada yang mengartikannya sebagai pendapat atau kepercayaan yang bebas, khususnya dalam politik. Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan atau kebijakan yang bebas, khususnya berkaitan dengan politik, perubahan sosial, agama, dan lain-lain. Ada yang sekadar memahaminya sebagai prinsip dan ide yang bebas.

Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan kepada kemajuan dan pembaruan. Ada juga yang mengartikannya sebagai sifat atau keadaan untuk menjadi bebas, khususnya dalam wacana filsafat politik yang membela kebebasan pribadi, bersifat individual; yang memperjuangkan bentuk pemerintahan yang demokratis; dan upaya pembaruan yang berangsur-angsur dalam institusi politik dan sosial.

Saya pribadi lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru kebebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimasukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak berbuat anarki. Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat. Di Indonesia, misalnya, ada orang yang mencantumkan kata Islam dalam KTP-nya agar mendapatkan kemudahan urusan administratif dan kependudukan meskipun agamanya bukan Islam.

*Terdapat semacam kekhawatiran sekelompok umat Islam tertentu yang menginginkan negara ikut campur dalam urusan agama. Sebab, kalau negara tidak*

*ikut campur, menurut mereka, negara dan, terlebih lagi, agama, akan terkikis oleh ideologi-ideologi lain. Apakah ketakutan semacam itu cukup beralasan?*

Barangkali dari perspektif orang yang merasa ketakutan, tentu mereka punya alasan. Tapi bagi kita, tentu saja, tidak. Dalam demokrasi, kebebasan setiap individu dijamin. Yakni, kebebasan individual sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah Usman Roy atau Lia Aminuddin, misalnya, mengganggu kebebasan umat Islam lainnya, sehingga negara ikut campur dan harus mengadili dan memenjarakan mereka? Mungkin bagi sekelompok umat Islam yang tidak mampu menerima kebebasan dan perbedaan, keyakinan yang dianut Usman Roy dan Lia Eden mereahkan. Tetapi itu hanya dalam pikiran mereka saja. Itu semata ketakutan yang berlebihan, di mana kalau keyakinan-keyakinan seperti itu dibiarkan akan menjadi saingan mereka, di samping juga akan bertambah banyak pengikutnya. Jadi, bukan karena keyakinan-keyakinan tersebut mengganggu dan memaksa sehingga hak-hak dan kebebasan mereka terancam.

---

Di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilahkan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

---

*Kalau alasannya karena penodaan akidah Islam?*

Menurut saya sejauh perbedaan paham tidak mengganggu, maka tidak bisa dikatakan seperti itu, walaupun pahamnya menurut kita aneh. Saya selalu berkata: kalau Anda tidak setuju dengan paham yang Anda anggap sesat, silakan Anda dakwahi orang itu. Tetapi berdakwah sudah ada ketentuannya dalam al-Quran: “*Ud’u ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw’izhah al-hasanah wa jâdil-hum bi al-latî hiya hsan*” (“Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik,” al-Quran 16: 125). Cara berdakwah itu ada tiga macam: (1) hikmah atau bijaksana; (2) nasihat yang baik; dan (3) berdebat dengan cara yang lebih baik. Bila orang lain tidak menerima



apa yang didakwahkan, tidak apa-apa. Batasnya adalah bahwa orang itu tidak mengganggu kebebasan kita. Jika ada orang Kristen atau orang Hindu memaksa kita (supaya pindah ke agama mereka), kita mungkin akan tersinggung. Atau, misalnya, jika ada orang Kristen datang ke rumah kita membawa Bibel atau Alkitab, wajar kita tersinggung. Namun, karena secara pribadi latar belakang atau basis saya adalah studi Perbandingan Agama, berbeda dengan kebanyakan orang, saya tidak tersinggung. Kalau mereka mengajarkan ajaran mereka di sekolah milik mereka, tentu saja tidak ada masalah. Itu adalah sekolah mereka. Akan tetapi, kalau mereka sampai mengganggu tetangga, masuk rumah tetangga, misalnya, itu baru masalah.

Kita harus bisa membedakan antara perihal kepercayaan dan perihal mengganggu ketertiban umum. Acara ritual keagamaan dengan pengeras suara yang mengganggu orang lain adalah persoalan. Contoh lain adalah mendirikan gereja di satu lingkungan tertentu. Jika gereja itu penuh oleh jemaat yang berakibat dengan parkir yang mengganggu tetangga sebelah atau jalanan umum, ini tentunya menjadi persoalan. Namun, hal seperti ini masih bisa diatasi dengan terlebih dahulu ditegur agar tempat parkir mobil pindah, misalnya, atau agar datangnya tidak menggunakan mobil pribadi. Dalam kasus seperti ini, harus dipisahkan antara pendirian gereja dan ketertiban parkir. Hanya saja persoalan seperti itu sering berubah menjadi persoalan yang menimbulkan konflik – dan dijadikan alasan bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan seperti pengusiran serta penghancuran gereja. Padahal, menurut saya, harus dipisahkan antara ketertiban umum dan paham teologis. Paham teologis tidak boleh dihakimi oleh manusia. Yang berhak menghakiminya hanyalah Tuhan. Al-Quran beberapa kali menyerukan, di antaranya, *“Fallâhu yahkumu baynahum yawm al-qiyâmati fîmâ kânû fihî yakhtalifûn”* (“Maka Allah menghakimi (menetapkan hukum) di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan,” al-Quran 2: 113). Kita tidak berhak menghakimi paham teologis atau kepercayaan seseorang. Ini merupakan ketentuan Tuhan. Maka, Ahmadiyah, aliran Usman Roy, Lia Eden tidak boleh dihakimi dan dizalimi. Sebab, itu semua adalah kehendak Allah. Allah berkata, *“Wa-law syâ’a rabbuka la-âmana man fî al-ardli kulluhum jamî’an. A-fa anta tukrih al-nâsa hattâ yakûnû mu’minîn”* (“Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini

beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin,” al-Quran 10: 99). Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya seluruh umat manusia menjadi penganut satu paham saja.

Jika demikian, kalau kita tidak setuju dengan orang-orang yang berbeda agama atau paham dengan kita, kita harus memperhatikan dua hal. *Pertama*, kita bisa mendakwahi mereka dengan cara di atas tadi. Kalau orang tersebut masih tidak menerima, biarkan saja, tidak perlu dengan pemaksaan. *Kedua*, mereka yang berbeda paham dengan kita, mereka belum tentu sesat. Kalau kita memandang tiga prinsip yang harus dipegang untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah, yaitu iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh, maka mereka jemaat Ahmadiyah, Usman Roy, dan Lia Eden, misalnya, tidak sesat. Mereka juga tidak bisa divonis telah menodai agama atau akidah Islam. Jadi, mereka mempunyai dasar dan argumentasi masing-masing atas apa yang mereka yakini dan lakukan.

---

Hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat.

---

*Menurut Anda, apakah agama secara teologis mendukung ide kebebasan? Lalu, mengapa Pak Maruf Amin berpendapat bahwa kebebasan itu ada hanya ketika orang belum memilih agama. Jika seseorang sudah memeluk Islam, maka ia tidak bebas dan dipaksa dengan segenap aturan-aturan di dalamnya.*

Begitulah pandangan orang Muslim yang tidak mengerti makna kebebasan dalam pandangan Islam. Sebab, mustahil memaksa semua orang harus semazhab dengan kita. Tidak mungkin pula menafsirkan agama secara seragam tanpa perbedaan. Itulah salahnya sebagian orang Muslim dulu dan juga sekarang. Banyak manusia yang memposisikan dirinya seperti Tuhan. Mereka sudah menghakimi paham orang lain dan memaksa orang lain untuk sepaham dan semazhab dengan mereka. Padahal jika menyangkut urusan teologis dan kepercayaan, kita hanya bisa memberikan

pertimbangan spekulatif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti sekarang di dunia ini. Siapa yang benar dan siapa yang sesat hanya diketahui secara pasti oleh Allah. Siapa yang selamat dan tidak selamat, masuk surga dan neraka di akhirat kelak, hanya diketahui oleh Allah. Sekali lagi, al-Quran memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihannya dengan konsekuensi berani menanggung risiko yang akan dihadapinya nanti di akhirat atas pilihan bebas itu.

*Bagaimana pandangan Anda tentang upaya formalisasi atau legalisasi hukum Islam, lalu di mana posisi minoritas jika nilai-nilai agama tertentu diterapkan sebagai hukum positif?*

Terkait dengan penerapan syariat Islam, pertama kali perlu saya tegaskan bahwa penolakan terhadap perda syariah tidak mesti berarti penolakan terhadap syariah. Penolakan itu adalah penolakan terhadap formalisasi syariah, bukan penolakan terhadap syariah itu sendiri. Tanpa formalisasi syariah atau tanpa pembentukan negara Islam, syariah sudah semestinya dijalankan oleh setiap orang Muslim. Untuk menjalankan syariah, kita tidak perlu menunggu formalisasi syariah atau negara Islam.

Pada prinsipnya yang lebih penting adalah aturan yang dapat menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk menganut dan melaksanakan agama atau kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dengan pengertian lain, titik-tengoknya bukan pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau tidak, begitu pula kontroversi perda syariat Islam. Persoalannya adalah apakah setiap individu diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan paham atau mazhab yang diyakininya. Contohnya jilbab. Ada yang berpendapat memakai jilbab itu wajib. Jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika tidak demikian, berarti tidak islami. Itu salah satu paham. Di sisi lain, terdapat juga paham yang memaknai jilbab secara berbeda. Misalnya, ada yang berpaham bahwa esensi jilbab adalah fungsinya untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Banyak orang tidak memakai jilbab tetapi berpakaian cukup sopan, seperti presenter TV. Dengan berpakaian seperti itu mereka bisa menjaga diri. Untuk itu, siapapun, termasuk juga pemerintah tidak bisa memaksa orang yang menganut paham yang kedua agar sepaham dengan yang

pertama, yang dianggap islami. Contoh lainnya, nikah beda agama. Ada mazhab fikih yang mengatakan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Tetapi juga ada mazhab yang mengatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan. Maka, semua mazhab yang berbeda tersebut tetap harus diberi tempat. Begitu pula hukum potong tangan bagi pencuri. Sangat mungkin ada yang memiliki tafsir lain. Misalnya, potong tangan lebih dimengerti sebagai memotong (menghilangkan) kekuasaan, oleh karena itu cukup dengan kurungan penjara. Tafsir lain ini juga harus diberi tempat. Dengan demikian, yang harus ditekankan adalah jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang diyakininya.

Sudah barang tentu minoritas juga sangat mungkin bisa terdapat dalam satu agama. Mereka mempunyai paham yang berbeda dari mayoritas, atau teologi *mainstream*. Karena itu, di mata umat yang mayoritas, mereka dianggap aneh, ganjil dan sesat. Sebaliknya bagi mereka sendiri, apa yang mereka anut tidaklah demikian. Ini yang harus dibela supaya iman dijalankan secara tulus. Tidak terjadi kepura-puraan dan keterpaksaan.

Jadi, lagi-lagi, persoalannya bukan pada apakah paham mayoritas itu dijadikan hukum positif atau tidak. Hanya saja, pada galibnya, problem yang kemudian menyeruak adalah ketika paham tersebut ditetapkan sebagai hukum positif, maka kebebasan tercabut. Bagi saya, itulah persoalan yang melingkupi perda-perda syariah, yang dalam praktiknya malah merampas kebebasan beragama itu sendiri. Ini mungkin landasan kenapa orang ramai-ramai menentang formalisasi hukum agama.

*Apakah untuk mencapai terpenuhinya hak dan kebebasan warga diperlukan undang-undang yang dapat menjamin mereka?*

---

Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhamad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pengurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi.

---

Saya setuju kalau ada perda yang menjamin kebebasan (beragama dan berkeyakinan). Namun, bukan berarti saya setuju dengan aliran kebatinan. Jangan disalahpahami. Saya tidak setuju dengan aliran kebatinan, tetapi saya juga tidak bisa memaksa penganut aliran kebatinan meninggalkan alirannya supaya menganut apa yang saya anut. Apa yang dilakukan Dawam Rahardjo bukan membela kebenaran ajaran Ahmadiyah, tetapi lebih membela hak dan kebebasan beragama yang juga menjadi ketentuan al-Quran. Saya bukan membela Ahmadiyah atau Lia Eden, tetapi membela kebebasan menurut al-Quran versi saya, yang kebetulan saja menguntungkan pihak Ahmadiyah dan komunitas Eden. Iman memerlukan ketulusan. Tanpa kebebasan tidak ada iman yang tulus. Masalahnya, seringkali peraturan dibuat oleh kalangan mayoritas sehingga merugikan kalangan minoritas, dalam arti merampas kebebasan mereka. Padahal, merampas kebebasan beragama sangat bertentangan dengan ajaran al-Quran yang justru menjamainya.

*Bagaimana kalau alasan dibuatnya aturan seperti perda syariah justru untuk menjaga moral umat?*

Itu harus kita kembalikan pada prinsip kebebasan. Dengan diterapkannya perda syariah, apakah kebebasan tetap terjamin tanpa mengganggu kebebasan orang lain yang tidak setuju dengan aturan-aturan yang terdapat dalam perda tersebut? Memang, *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* harus dijalankan di manapun oleh umat Islam. Tapi tidak perlu syariat Islam diformalkan. Karena itu, harus ditegaskan di sini bahwa ketika seseorang tidak setuju syariah diformalkan tidak berarti dia anti-syariah. Pemahaman tentang syariah berbeda-beda. Dalam Islam kita menemukan beberapa mazhab fikih yang berbeda. Setiap penganut mazhab fikih hendaknya menjalankan syariah sesuai dengan fikih (pemahaman) masing-masing mazhab yang dianutnya.

Semua agama mempunyai syariah. Setiap orang yang beragama menjalankan syariahnya masing-masing. Apa yang dijalankan oleh seorang penganut agama tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agamanya. Itulah syariah yang dijalankannya.

*Bukankah syariah itu sendiri pada dirinya memaksa?*

Jika saya harus melakukan sesuatu menurut hati saya, berarti hati saya memaksa diri saya. Mungkin itu benar. Tetapi, pemaksaan di sini bukan dalam arti seperti itu. Yang dimaksud dengan pemaksaan: apabila ada kekuasaan atau kekuatan di luar yang memaksa seseorang atau satu komunitas untuk menjalankan ajaran yang ditentukan pihak luar. Dengan kata lain, ada unsur eksternal yang memaksa. Misalnya (negara) memaksa setiap warga negara menjalankan apa yang telah ditetapkan secara formal.

Sebaliknya, kalau saya menjalankan sesuatu menurut apa yang saya anut, ini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang saya anut memaksa saya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan memaksa adalah bahwa membuat kita harus terikat pada apa yang kita yakini, itu memang memaksa, tetapi tidak disebut memaksa dalam pengertian adanya keterlibatan pihak luar. Kata *'aqidah* berarti ikatan; yang mengikat kita. Itu adalah masalah teologis, ilmu kalam. Meskipun begitu, Ibn Arabi mengkritik bahwa Tuhan di dalam akidah bukanlah Tuhan (dalam arti sesungguhnya). Tuhan dalam akidah adalah Tuhan dalam persepsi manusia, Tuhan buatan manusia.

---

Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis. Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk menguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi, semacam egoisme teologis, yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita, dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

---

*Bagaimana jika iman mengharuskan untuk memaksa orang lain, bahkan sering dengan kekerasan?*

Jamaknya, masalah seperti ini sangat terkait dengan kekuasaan. Jadi, seseorang akan berani memaksa orang lain, meskipun pemaksaan ini tidak benar, ketika posisi dia lebih tinggi. Seandainya yang mayoritas adalah jemaat Ahmadiyah, kemudian mereka melarang orang Sunni menjalankan keyakinannya, saya akan memprotes juga. Saya akan membela Sunni, lebih tepatnya membela kebebasan menjalankan keyakinannya. Jadi, adalah sesuatu yang manusiawi: karena ada kekuasaan di tangan sekelompok

orang, atau paling tidak dia tidak terhalangi oleh kekuasaan, maka sering terjadi pemaksaan. Secara tidak sadar orang yang dalam posisi memperoleh kekuasaan pasti selalu merasa tidak pernah memaksa. Padahal secara tidak langsung ia telah memaksa. Memang, terdapat banyak sanggahan dari mereka atau pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain, bahwa persoalan ini bukan berkaitan dengan kebebasan beragama, melainkan lebih menjadi persoalan akidah – yang menurut mereka sedang terancam dan mengalami penodaan.

Kendati demikian, harus diingat bahwa akidah adalah ciptaan manusia. Dalam Islam, karena terdapat perselisihan paham atau penafsiran terhadap persoalan agama, banyak muncul akidah, di antaranya *Ahl al-Sunnah*, Syi'ah, Ahmadiyah, dan sebagainya. *Ahl al-Sunnah* juga bermacam-macam, ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Demikianpun Syi'ah tidak hanya satu paham, juga Ahmadiyah dan seterusnya.

Sejatinya, Tuhan tidak bisa diikat oleh akidah. Tuhan di luar akidah. Kalau Tuhan diikat berarti Tuhan terbatas. Padahal Tuhan tidak dapat dibatasi. Maka dari itu jangan menuhankan akidah, tuhankanlah Tuhan. Orang seringkali tidak menyadari bahwa dia lebih setia pada akidahnya, alirannya, sektenya ketimbang kepada Tuhan. Mereka juga tidak menyadari bahwa Tuhan melarang kita membunuh orang lain. Tetapi, seringkali atas nama akidah ataupun Tuhan, tidak jarang orang rela membunuh. Ini bertentangan dengan larangan membunuh. Ini sangat bertentangan dengan prinsip bahwa Tuhan memberikan kebebasan dalam beragama. Ini bertentangan dengan kemauan Tuhan.

*Apakah menurut Anda kebebasan beragama berkorelasi atau menunjang kemajuan sebuah bangsa?*

Kebebasan beragama dan kemajuan jelas mempunyai korelasi, tetapi hal tersebut jangan dikaitkan atau diukur dengan materi. Sebab dalam kemajuan sebuah bangsa terdapat aspek intelektual dan spiritual. Karena itu, semangat kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang menunjang kemajuan bangsa harus terus diperjuangkan. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan harus dijamin. Kebebasan beragama juga harus dijamin. Jika tidak, saya kira

bukan hanya Ahmadiyah saja yang akan dibungkam, begitupun kelompok-kelompok liberal juga akan dibungkam, termasuk tafsir-tafsir yang dianggap aneh. Padahal, tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman itu mungkin dianggap aneh bagi kelompok tertentu, tetapi tidak aneh bagi pendukungnya. Karena mereka benar-benar tidak paham atas tafsir-tafsir tersebut, kemudian mereka menganggapnya aneh. Lantas, setiap yang mereka anggap aneh harus dibungkam. Jadi pada saatnya nanti bukan hanya Ahmadiyah, mungkin juga Paramadina, Jaringan Islam Liberal, kaum minoritas lain, dan paham-paham baru lain akan menjadi sasaran mereka.

*Alasan mereka membungkam bukan hanya karena ketakutan teologis, tetapi juga politis. Sebab mereka membayangkan kalau seragam niscaya nantinya menjadi lebih mudah teratur, tertib dan akan mudah mencapai peradaban yang diidamkan.*

Itu yang keliru. Justru keragaman adalah hukum alam. Kalau kita menentang perbedaan berarti menentang hukum alam. Kita patut merenungkan kata-kata bijak yang berbunyi, “*The world would be a dull place if we all agreed on everything.*” Karenanya jangan memaksa untuk seragam. Tuhan sendiri, seandainya

menghendaki, semua orang menjadi satu umat. Itu tentu bisa dan sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Bukankah Tuhan telah mengatakan, seperti disebut di atas, “Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin?” (al-Quran 10: 99).

---

Kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka, kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama.

---

*Belakangan ini ada isu syariat Islam dipertentangkan dengan Pancasila, sebagai upaya dari beberapa kalangan Islam yang berhasrat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bentuk aturan-aturan formal, baik*



*berupa peraturan daerah ataupun lebih ekstrem lagi negara Islam. Apa respon Anda atas upaya-upaya tersebut?*

Seharusnya syariat Islam tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Pasalnya, pengertian dan paham kita tentang syariat Islam juga berbeda-beda, sebagaimana fikih juga bermacam-macam. Sekarang ada pula tafsir baru tentang syariah. Misalnya yang dilontarkan oleh Mahmud Thaha dan Abdullahi An-Na'im. Mereka mempunyai teori evolusi syariah. Menurut mereka syariah yang selama ini dijalankan masih diskriminatif terhadap kaum perempuan dan non-Muslim. Mereka lantas menekankan bahwa syariah yang dibutuhkan adalah syariah yang universal, egalitarian, demokratis, dan tidak diskriminatif. Mereka tidak anti-syariah. Mereka hanya memberikan tafsir baru tentang syariah. Biarkan saja orang menuduh tafsir baru itu sesat, asal jangan Tuhan yang menuduhnya.

*Lalu, apakah Pancasila, sebagai dasar negara kita, dan UUD '45, sebagai landasan konstitusinya, sudah ideal?*

Ya. Menurut saya tidak ada yang menjadi masalah. Itu memang cocok untuk Indonesia. Pancasila dan UUD '45 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, bagi saya, kembali lagi pada apa yang tadi sudah saya ungkapkan di atas: persoalannya bukan formalisasi syariah lewat perda-perda atau tidak, tetapi lebih pada problem terancamnya hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau syariah menurut sebuah paham tertentu sudah dijadikan perda, maka syariah menurut paham lain yang berbeda niscaya tidak akan mendapat tempat. Akhirnya orang menjalankan agama karena keterpaksaan, bukan karena ketulusan. Agama tanpa ketulusan tidak ada artinya. Begitupun tidak ada artinya menjalankan agama dengan keterpaksaan dan kepalsuan (kepura-puraan).

*Mengapa resistensi umat Islam terhadap pluralisme demikian kuat?*

Tentu saja, di samping sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga lebih ditangkal oleh kebanyakan orang sebagai hantu. Akibatnya resistensi terhadap pluralisme bukan semakin reda, justru kian deras. Di benak

mereka hanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Sementara itu, saya lebih melihat pluralisme secara bertingkat. Pada tingkat sosiologis, selama orang menghargai kemajemukan, walaupun misalnya tidak mengakui kebenaran agama lain atau paham lain, saya kira itu sudah bagus. Pada tingkat teologis, pluralisme biasanya diartikan bahwa semua agama, meskipun berbeda dalam rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya, tetap memiliki tujuan yang sama. Yakni, bahwa semua agama, sejatinya, membawa para penganutnya kepada keselamatan. Inilah kesamaan dari setiap tujuan agama.

Pada hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Hanya saja, orang tidak berani mengatakan secara terus terang bahwa agama-agama lain (yaitu agama-agama selain Islam) tidak membawa keselamatan di akhirat. Sebagai perumpamaan, kalau orang tidak masuk Islam, kelak dia masuk neraka. MUI tentu tidak secara eksplisit mengatakan hal seperti itu. Tapi apa yang ditetapkan MUI berujung ke situ:

---

Dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah menanamkan sikap tidak toleran.

---

“Kalau tidak memeluk Islam, orang tidak akan selamat.” Namun, lagi-lagi, MUI dan kebanyakan orang tidak berani terang-terangan mengatakan pernyataan setegas itu. Itu adalah masalah eskatologis, masalah yang terkait dengan tujuan final hidup. Kebenaran masalah ini tidak bisa dibuktikan sekarang ini. Bukti kebenarannya hanya dapat dilihat di akhirat nanti. Berbeda halnya dengan hidup di dunia ini. Bagaimana hidup di dunia ini, semua orang, begitu juga orang-orang MUI, mengetahui bahwa negara-negara Barat yang demikian maju tidak pernah mengusung agama untuk dijadikan dasar negara. Tanpa agama negara-negara Barat yang sekular jauh lebih maju, makmur, kaya, dan aman.

*Apakah penolakan dan pengharaman umat Islam dan MUI terhadap pluralisme, dengan alasan paham tersebut mengidap ide-ide sinkretisme yang dapat melemahkan dan membahayakan iman umat Islam, hanya bentuk dari kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan?*

Ini terkait dengan masalah teologis. Pluralisme merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama – meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya – adalah benar. Paham ini, bagi mereka, berbahaya. Keyakinan mereka tidak bisa ditawar-tawar lagi: pokoknya, kalau ingin selamat, masuklah agama Islam. Kalau masuk agama lain, Kristen misalnya, akan masuk neraka. Itu sudah doktrin yang tidak bisa diubah lagi. Hanya saja orang tidak bilang seperti itu.

Perbedaan pandangan tentang persoalan ini tidak akan pernah hilang. Yang penting adalah bahwa kita harus toleran terhadap perbedaan. Kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan tentang masalah ini. Saya sering berkata, “Daripada kita bertengkar lebih baik kita buktikan saja siapa yang selamat dan yang tidak selamat nanti di akhirat.” Bagi saya, Islam sama dengan apa yang diajarkan oleh para penafsir pluralis, bahwa Islam dalam arti esensialnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Dalam arti dasarnya *islâm* adalah “ketundukan” (*inqiyâd*), “kepatuhan” (*tadzallul*), dan khusuk (*khusyû'*) kepada Allah. Ketika menakwilkan ayat yang berbunyi, “Sesungguhnya *dîn* (yang benar) di sisi Allah adalah *islâm*” (al-Quran 3: 19), al-Thabari, seorang penafsir klasik terkemuka, mengatakan bahwa ayat ini bermakna: “Sesungguhnya kepatuhan yang adalah satu-satunya kepatuhan di sisi-Nya adalah kepatuhan kepada-Nya, pengikraran lidah dan kalbu bagi-Nya dengan penghambaan dan kerendahan, dan ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan kepatuhan tentang apa yang disuruh dan dilarang, kerendahan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan itu tanpa menyombongkan diri kepada-Nya, tanpa berpaling dari-Nya, dan tanpa menyekutukan segala sesuatu selain Dia dengan Dia dalam kehambaan dan ketuhanan.” Jadi, sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah ‘islam’ (dengan huruf kecil). Sikap semacam itu tidak hanya terdapat dalam agama Islam. Dalam agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, seperti penganut aliran kebatinan, jika pasrah pada Tuhan, itu adalah ‘islam.’ Ini adalah ‘islam’ dalam arti esensial, bukan dalam arti sosiologis.

Saya pernah mengunjungi salah sebuah kelompok di Skotlandia dan kebetulan saya pernah tinggal bersama mereka di sana. Mereka tidak mau disebut beragama, tapi pasrah kepada Tuhan – Budhy Munawar-Rachman juga mengetahui orang-orang dari kelompok itu yang lazim disebut Beshara. Mereka sangat menekankan sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan. Mereka juga mempraktikkan zikir. Sikap pasrah dan zikir selalu ditekankan oleh orang-orang Beshara tanpa harus mengungkapkan identitas agama apa yang mereka anut. Mereka menekankan sikap “*constant awareness to Him,*” kesadaran yang konstan terhadap Dia Yang Mahamutlak. Ini adalah bentuk spiritualitas yang membuat orang dalam hidupnya sampai pada kondisi yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Kesadaran konstan kepada Tuhan adalah zikir. Dengan zikir yang terus-menerus seseorang pasrah pada Tuhan setiap saat. Orang-orang Beshara itu ketika ditanya, “*What is your religion?*,” mereka bisa tersinggung. “*We are secular,*” mereka bilang. Tetapi mereka berzikir dan pasrah kepada Tuhan. Bahasa yang digunakan untuk zikir bersama di Beshara School, Chisholme, Robertson, Hawick, Skotlandia, adalah bahasa Arab lantaran mereka mengambil unsur-unsur Islam. Di ruang-ruang studi, meditasi, kantor, dapur, dan lainnya, yang terdapat dalam bangunan-bangunan di Chisholme, ditemukan banyak kaligrafi Arab dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits.

Di Beshara School para ‘santri’ belajar kitab *Fushûsh al-Hikam*, kitab *Bhagavad Gita*, kitab *Tao Te Cing*, dan kitab *Injil Apokrifal*. Semua kitab ini mengandung ilmu esoterik yang pada intinya sama. Jika seseorang bisa memahami kitab *Fushûsh al-Hikam*, dia mudah memahami kitab *Bhagavad Gita*, *Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu juga jika seseorang bisa memahami kitab *Bhagavad Gita*, dia mudah memahami *Fushûsh al-Hikam*, *Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu seterusnya dengan dua

---

Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara sahabat mengenai *khilafah* menunjukkan bahwa al-Qur’an tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan “jabatan” kepala negara setelah Nabi saw wafat.

---

kitab lain. Beshara tidak terikat dengan agama apapun atau sistem filsafat apapun, tetapi juga tidak menolaknya. Yang lebih ditekankan adalah pendidikan esoterik. Yang lebih penting adalah esensi, bukan bentuk. Orang-orang Beshara sama sekali tidak menonjolkan agama, dalam arti sebagai institusi formal, melainkan lebih menekankan esensi agama, yaitu spiritualitas. Mereka menekankan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Mereka yang sudah menjiwai kitab-kitab semacam itu malah lebih rajin melakukan meditasi dan zikir. Tetapi kalau mereka ditanya soal agama, mereka kerap menjawab tidak menganut agama, yaitu agama dalam arti sosiologis.

Maka, kita harus senantiasa kembali kepada makna 'islam' sebagai kepasrahan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan 'islam' sebagai kualitas personal. Di sini 'islam' tidak lagi dimaknai sebagai lembaga atau sistem yang formal. Sebaliknya yang dimaksud dengan 'islam' di sini adalah 'islam' sebagai kualitas personal, atau yang disebut Wilfred Cantwell Smith sebagai "agama personal" (*personal religion*). Artinya, 'islam' bukan sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang teologi dan ritual. Pada mulanya, dalam sejarah, agama merupakan kualitas atau pengalaman spiritual. Namun, apa lacur, justru yang kemudian lebih populer seperti sekarang ini adalah agama sebagai sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang persoalan-persoalan ketuhanan dan praktik ritual.

Sejatinya, dalam arti dasarnya agama atau *dîn* adalah ketaatan, kepatuhan, dan kesalehan kepada Allah. Jadi, 'islam' sebagai agama dalam arti dasarnya bukan sistem atau lembaga, tapi kualitas personal. Dengan demikian menjadi jelas di sini bahwa apa yang dimaksud dengan 'islam' adalah kualitas personal. Kalau dipahami seperti ini, maka siapapun yang pasrah pada Tuhan dia adalah 'muslim' (dengan memakai "m" kecil). Ihwal seperti ini juga dikemukakan oleh Bawa Muhayyaddin, seorang Sufi asal Sri Lanka yang pernah bermukim di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurutnya, 'islam' memiliki dua arti: (1) 'islam' dalam arti esensial, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, dan (2) 'Islam' dalam arti *congregation*, yaitu Islam dalam arti komunitas. Islam dalam arti yang kedua inilah yang ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sementara 'islam' dalam arti esensial telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Sampai kapanpun dan di mana-pun 'islam' dalam arti esensial akan terus ber-

semayam dalam batin manusia yang selalu pasrah, patuh dan sadar akan kehadiran Tuhannya.

*Doktrin resmi mayoritas menyatakan: agama-gama lain juga benar tapi diasumsikan sebelum kedatangan agama Muhammad. Setelah Muhammad datang, semua manusia harus menganut Islam. Sebab, semua agama sebelum Muhammad, termasuk Yahudi, Nasrani, apalagi agama pagan, tidak berlaku lagi. Ini adalah tafsir mainstream terhadap al-Quran.*

Kita harus membedakan antara al-Quran dan tafsirnya. Orang sering mengklaim bahwa apa yang dikatakannya adalah al-Quran. Padahal itu adalah al-Quran menurut tafsir atau pemahaman orang tersebut. Belum tentu orang lain memiliki tafsir yang sama dengan tafsirannya. Hal seperti ini yang sering terjadi. Abdulaziz Sachedina, seorang pemikir Muslim terkemuka asal Iran, mengatakan bahwa tidak ada ayat yang tegas yang menyatakan bahwa agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad terhapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang berbunyi, “*Inna al-dīna ‘inda Allāh al-islām,*” (Q. 3: 19) juga bisa dimaknai bahwa agama yang dimaksud bukanlah sistem, melainkan agama personal; sikap kepasrahan kepada Tuhan. Maka ayat ini bisa diterjemahkan sebagai, “Sesungguhnya kepatuhan – yang diterima – di sisi Allah adalah kepasrahan – kepada-Nya.”

---

Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak.

Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama.

Itu menjadi urusan warga bersama.

Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

---

*Bukankah ayat-ayat al-Quran, misalnya yang terkait dengan reaksi al-Quran terhadap Yahudi, turun sebagai respon atas sikap Yahudi hanya untuk*

*kala itu? Tetapi celakanya ayat-ayat tersebut lantas selalu menjadi rujukan umat Islam sekarang untuk membenci Yahudi atau agama lain.*

Konteks ketika ayat-ayat al-Quran turun haruslah diperhatikan. Nabi hidup dalam situasi perang dengan kelompok-kelompok non-Muslim. Tetapi harus diingat bahwa perang antara umat Islam kala itu selalu dimulai oleh gangguan orang-orang musyrik. Namun Nabi Muhammad juga pernah berteman dengan Najasi, raja Habasyah, sekarang Ethiopia. Nabi juga pernah punya Sahabat Mukhairiq, pendeta Yahudi, sampai beliau meninggal. Nabi juga pernah mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi terbaik. Bahkan Nabi pernah mengizinkan orang-orang Nasrani dari Najran melakukan kebaktian di mesjid beliau. Jadi, Nabi memberikan tauladan agar bersikap toleran terhadap para penganut agama-agama lain.

*Dalam perjalanan sejarah agama-agama belakangan ini, Barat sangat menghargai kebebasan beragama, sementara di wilayah lain, seperti negara-negara yang mayoritas Islam, penghargaan terhadap semangat kebebasan beragama kurang mendapat tempat. Apakah memang seperti itu?*

Sebelum muncul negara-bangsa, khususnya sebelum revolusi Prancis, situasi di Barat sangat parah. Konflik internal di kalangan umat Kristiani parah sekali. Kalau kita membaca sejarah gereja, ada kelompok reformasi dan antireformasi. Perang di antara mereka telah memakan korban yang sangat banyak dan berlangsung puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terbagi-baginya negara Eropa juga terkait dengan perang antara kelompok reformasi dengan kelompok antireformasi. Hingga kini, sisa pertikaian masih ada. Tetapi, mungkin lantaran mereka sudah kapok dan kelelahan oleh konflik yang amat panjang lantas berhenti dan justru membangun toleransi yang lebih kuat. Namun munculnya semangat toleransi di Barat sebetulnya bukan hanya murni karena masalah agama. Amerika, misalnya, lebih karena perang antar-warga mereka sendiri (*civil war*). Faktor pengalaman buruk akibat perang dan kelelahan menimbulkan semangat toleransi. Mereka mau belajar dari pengalaman sejarah dan tidak ingin mengulangi masa-masa gelap (peperangan) seperti sebelumnya. Kesimpulan yang hendak saya sampaikan adalah: seharusnya kita mengambil pelajaran dari sejarah orang lain.

Tetapi yang lebih menarik lagi, ketika saya membandingkan agama-agama dalam konteks sejarahnya, konflik antaragama dan internal agama justru yang paling sedikit di Timur, tempat lahir dan berkembangnya Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Sebab, Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme sangat kuat menekankan kasih sayang, kedamaian, dan keharmonian. Karena itu di kalangan para penganut setianya, suasana harmoni, kedamaian dan ketenangan terasa sangat kuat. Tradisi meditasi dan yoga sangat kuat di kalangan mereka. Kalaulpun ada konflik antaragama seperti di Thailand atau di belahan bumi bagian Timur lain lebih disebabkan faktor politis. Unsur agamanya sangat kecil. Sejauh yang saya ketahui pula, perang antarsekte dalam Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme tidak ada. Sebaliknya dalam sejarah Islam ada, seperti antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syi'i. Begitupun dalam Kristen, seperti perang antara Katolik dan Protestan.

---

Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

---

*Pandangan-pandangan Anda yang sangat toleran dan mendamaikan ini ditentang banyak orang. Lalu, bagaimana masa depan pemikiran seperti ini, apakah akan semakin diterima orang atau semakin terkikis?*

Saya tidak mengetahui persis. Tapi yang jelas saya tidak sendirian, walaupun juga tidak bisa dikatakan sebagai mayoritas. Orang-orang yang bersikap toleran seperti orang-orang Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), International Center for Islam and Plu-



ralism (ICIP), The Wahid Institute, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), sebuah aliansi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia yang memperjuangkan *religious freedom*, dan orang-orang dari organisasi-organisasi lain yang mendukung pluralisme adalah orang-orang yang memperjuangkan sikap mendukung dan menghargai kemajemukan. Jumlah mereka memang sedikit. Maka, dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah menanamkan sikap tidak toleran.

Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhammad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pengurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi. Apakah ada pengurus masjid berani mengizinkan orang Kristen melakukan kebaktian di masjid? Malah sebaliknya, alih-alih memberi fasilitas kepada orang Kristen untuk mengadakan kebaktian atau non-Muslim lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, kalau bisa gereja dan tempat ibadah lainnya diruntuhkan saja.

Dalam kaitan dengan gagasan pluralisme, lantas ‘islam’ dalam arti manakah yang seharusnya dijiwai setiap orang? Saat ini orang lebih menyukai mengartikan Islam sebagai sistem. Bagi kebanyakan umatnya, yang dimaksud Islam adalah Islam yang khusus hadir sejak zaman Nabi Muhammad atau agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu sudah terhapuslah ‘islam’ yang sebelumnya. Demikianlah kaca mata eksklusivisme. Maka hanya penganut Islam saja yang benar. Kalau tidak menganut Islam seseorang tidak akan selamat di akhirat kelak. Tetapi saya sering mengatakan, “Apa ruginya orang-orang dari agama-agama lain kalau mereka juga selamat dan masuk surga?” Dalam suatu kesempatan diskusi di Teater Utan Kayu saya juga pernah mengatakan, “Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis.” Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk me-

nguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi semacam egoisme teologis yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

*Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pluralisme harus mengandaikan sekularisme dan liberalisme atau sebaliknya?*

Bagi saya, ini agak sulit. Saya tidak bisa mengatakan secara otomatis seperti itu. Tetapi menurut saya pluralisme lebih dekat dengan gagasan demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Karena pluralisme menghormati kemajemukan. Jika itu diabaikan, tidak mungkin demokrasi bisa berjalan. Demokrasi juga sangat terkait dengan *civil society*. *Civil society* berarti masyarakat secara bebas dan mandiri mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keinginan-keinginannya. Jadi masyarakat tidak didominasi oleh negara. Hal seperti itu sejalan pula dengan sekularisme di mana negara tidak mendominasi atau tidak didominasi oleh satu agama, dan yang secara implisit satu aliran semata. Kalau dikuasai oleh satu agama – yang berarti juga satu paham teologi atau satu mazhab agama – secara otomatis agama lain juga paham teologi lain atau mazhab lain akan terpinggirkan. Di sini tidak ada kebebasan. Padahal kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama. Dalam hal ini saya setuju dengan Abdul Karim Soroush yang membela kebebasan supaya manusia beriman dengan murni dan tulus.

---

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kelompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat.

---

Misalnya, orang memakai jilbab. Saya, dulu dan juga sekarang, sangat anti terhadap setiap kantor pemerintah atau kantor swasta yang melarang orang memakai jilbab. Sebab itu adalah keyakinan pemakainya. Karena itu pemakaian jilbab tidak boleh dilarang. Pelarangan adalah upaya pemaksaan agar tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah pemakaian jilbab. Kebebasan memakai jilbab harus dijamin. Begitupun sebaliknya, orang juga tidak boleh memaksakan supaya orang lain memakai jilbab. Contoh lainnya lagi, di suatu daerah jika tidak memakai jilbab akan ditangkap. Hal seperti ini nantinya akan menyebabkan sangat banyak kemunafikan. Akhirnya, orang memakai jilbab bukan karena Allah, tapi lantaran takut ditangkap oleh polisi. Atau, begitu juga dengan salat. Kalau orang tidak salat akan ditangkap polisi, akibatnya orang salat bukan lagi karena ketulusan. Dahulu, waktu Soeharto masih memerintah, ada tradisi melaksanakan salat *tarâwih* di kantor-kantor menterinya. Semua bawahannya ikut. Tentu saja motif ibadah mereka bukan murni karena Allah, tapi karena jabatan. Jadi, kalau beribadah, orang mestinya betul-betul tulus, bukan karena ikut-ikutan saja karena kepala kantornya atau karena khawatir dipecat dan diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Ini cara beragama yang tidak baik.

Ini bukan berarti saya menyetujui orang yang tidak salat. Atau misalnya juga saya tidak menyetujui ateisme. Namun demikian, kaum ateis jangan pula dipaksa untuk mengucapkan pernyataan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hal ini sangatlah penting supaya kalau seseorang percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu betul-betul tulus. Kita pun tidak bisa memaksa orang lain untuk sepaham dengan kita. Karena keimanan itu sendiri datangnya dari Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan berkehendak menjadikan semua orang menjadi satu umat yang beriman, tentu Tuhan bisa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu. Agama harus dijalankan secara tulus supaya tidak terjadi kemunafikan.

Meskipun saya juga tidak menyetujui pornografi, dan dalam batas-batas tertentu kita juga harus tahu sopan-santun, tetapi, bagi saya, orang tidak bisa dipaksa memakai jilbab, apalagi ditangkap karena tidak memakai jilbab. Maka akan menjadi masalah apabila negara mencampuri urusan agama – terlebih beragama dan berkeyakinan merupakan urusan yang sangat per-

sonal – seperti mengatur pakaian atau mewajibkan memakai jilbab. Akibatnya banyak orang memakai jilbab bukan karena keimanan, tapi lebih karena takut ditangkap. Artinya ke-imanan itu tidak tulus. Yang kita inginkan adalah ketulusan dalam beriman. Meskipun orang tidak memakai jilbab, kita tidak lantas membenci dia atau mengusir dia dan memperlakukannya secara diskriminatif. Ini sekadar contoh, tentu ada contoh-contoh yang lain. Dalam makalah yang dibikin untuk acara *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*, saya pernah menyinggung peraturan yang diterapkan rezim Taliban yang

sangat menindas kaum perempuan di sana, yang menetapkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di dalam buku *My Forbidden Face*, yang ditulis oleh Latifa, seorang perempuan muda korban peraturan rezim Taliban di Afghanistan, misalnya, disebutkan bahwa kaum ibu dan perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah, kaum ibu dan perempuan dilarang mengenakan pakaian berwarna terang di dalam burqa mereka, kaum perempuan juga tidak boleh naik taksi kecuali bersama muhrimnya. Termasuk di dalam bus kota, laki-laki dan perempuan harus dipisah.

Jadi, istilah-istilah liberalisme, sekularisme dan pluralisme, saya khawatir itu lebih merupakan ‘hantu’ daripada kenyataan. Itu hanya ada dalam pikiran. Apabila kita melihat di alam nyata, negara-negara Barat yang maju, seperti Britania Raya, Prancis dan Jerman yang menerapkan ketiga paham tersebut, kendatipun mungkin tidak dieksplisitkan, angka kriminalitasnya lebih kecil, korupsinya juga tidak sebesar di sini. Di Indonesia, kita setiap hari dapat membaca berita di media-media massa tentang orang saling bacok, perkelahian antar-kampung, tawuran pelajar, perampokan, dan tindak pelbagai kriminal lainnya. Semua itu terpampang nyata kalau kita membaca berita dan menyaksikan acara-acara seperti Derap Hukum dan sejenisnya di televisi. Saya kira kriminalitas di negara-negara Barat yang maju tidak sebesar di sini.

---

Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata “Islam” dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata “Islam” telah mengalami inflasi.

---

*Kalau memang kebanyakan dari umat Islam dan MUI cenderung lebih suka melihat 'hantu'nya, dan karena itu lantas mengharamkan begitu rupa, ketimbang mencoba untuk belajar secara objektif apa sesungguhnya sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan semua itu?*

Menurut saya kebanyakan mereka tidak mau memahami realitas yang sebenarnya. Cobalah jalan-jalan atau tinggal di sana (negara-negara Barat). Memang, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di sana, seperti Prancis, Jerman, Swedia, Swis, Austria, atau tempat lain seperti Jepang, tentu saja ada kekurangan, tetapi negara-negara itu lebih makmur, korupsinya lebih kecil daripada yang terjadi di negara kita. Di sini, kita sehari-hari melihat para peminta-minta atau pengemis di bus kota dan di tempat-tempat lain. Kenyataannya seperti itu.

Mungkin penolakan atau pengharaman terhadap ketiga gagasan tersebut lantaran orang tidak paham atau mungkin juga karena ketakutan-ketakutan itu. Dan karena alasan-alasan itu pula, sampai-sampai demokrasi juga diharamkan. Kita juga tidak perlu meniru Barat sepenuhnya, apalagi menjadi 'terbaratkan.'

*Atau lantaran mereka menganggap ketiga paham tersebut sebagai produk Barat. Padahal dalam kenyataannya sekularisasi di negara Islam sendiri sebetulnya sudah menjadi praktik keseharian. Mereka mengadakan pemilu dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap menggunakan jargon bahwa mereka tidak sekular.*

Mereka, negara-negara Barat, tidak latah mengukur diri mereka dengan jargon dan slogan-slogan, "Kami negara sekular," misalnya, bahkan ungkapan itu pun tidak diucapkan. Tetapi mereka lebih mempraktikkan semangatnya. Saya tambahkan juga di sini, bahwa negara lain yang lebih bagus daripada negara kita pasti akan menjadi incaran bagi para imigran. Kenyataannya penduduk Aljazair, yang mayoritas Muslim, dan juga penduduk negara-negara lain di Afrika, Turki dan negara-negara berkembang lainnya, ingin pergi ke Eropa. Artinya mereka tidak betah di negaranya sendiri. Mereka susah mencari penghidupan di negara sendiri. Ini menjadi bukti bahwa negara orang lain lebih disukai daripada negara sendiri. Dahulu

banyak pengungsi dari Vietnam dan Kamboja hijrah ke Amerika karena hidup di negara mereka sendiri sangat susah. Sama saja misalnya, sekarang, orang Papua lebih memilih pindah ke Australia karena Australia dianggap lebih bagus penghidupannya. Demikian juga Indonesia, banyak tenaga kerja kita yang pergi ke negara-negara lain. Jadi kalau di negara sendiri kurang baik, orang akan memilih pergi ke negara lain yang lebih maju. Itu tidak bisa kita bantah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006